

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada saat ini Indonesia merupakan negara yang masih tergolong sebagai negara berkembang bukan negara maju dikarenakan beberapa hal seperti tingkat pertumbuhan penduduk tinggi, angka pengangguran yang tinggi, kemiskinan yang tinggi, pendidikan berkualitas yang belum merata, dan infrastruktur yang belum merata. Simon Kuznet menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan *public service obligation*, yaitu sesuatu yang seharusnya menjadi kewajiban pemerintah karena infrastruktur merupakan sarana publik paling utama yang mendukung kegiatan ekonomi suatu negara. Ketersediaan infrastruktur juga sangat menentukan tingkat keefisienan dan keefektifan kegiatan ekonomi serta merupakan prasyarat agar berputarnya roda perekonomian bisa berjalan dengan baik.

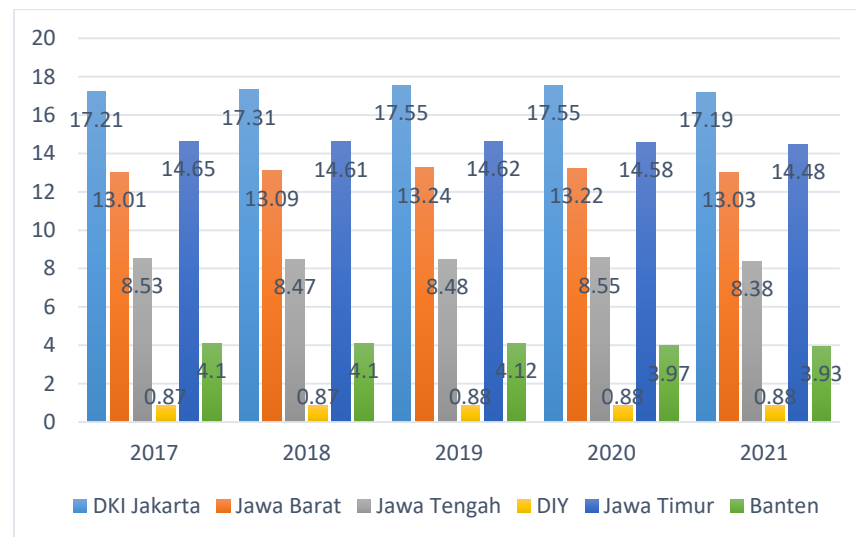
Pembangunan ekonomi sangatlah penting bagi kemajuan suatu daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan daerah tersebut. Pembangunan ekonomi tidak dapat dicapai semata-mata dengan menyingkirkan ekonomi hambatan yang menghalangi kemajuan teknologi. Pertumbuhan ekonomi menjadi faktor utama dalam melihat hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan dan direalisasikan serta

menentukan arah pembangunan di masa yang akan datang. Pertumbuhan ekonomi yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian. Proses pembangunan memiliki tiga tujuan yaitu peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup yang pokok, peningkatan standar hidup dan perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan (Torado dan Smith, 2006:3).

Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu Negara dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Bruto (PDB) sedangkan untuk cakupan wilayah/provinsi dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tentunya jumlah output/produk berupa barang dan jasa dalam perekonomian di suatu wilayah telah diuraikan dengan menghitung besarnya nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berperan sebagai pengukur tingkat pendapatan bruto dalam suatu provinsi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mempunyai pengaruh pada perekonomian dalam proses pendistribusian pendapatan bruto dan kekayaan output setiap provinsi perkapita. Meningkat dan menurunnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan tingkat keberhasilan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harus ditingkatkan agar pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat tercapai. Peranan pembangunan daerah dalam

meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tentunya tidak lepas dari pembangunan infrastruktur daerah tersebut.



Gambar 1.1
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2017-2021

Sumber : BPS Nasional

Struktur perekonomian Provinsi Jawa Barat yang digambarkan oleh distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku menunjukkan bahwa kontribusi nilai tertinggi PDRB Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021 dicapai oleh sektor Industri Pengolahan dan Manufaktur yang selalu diatas 40 persen. Menurut data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional pada tahun 2022, kontribusi distribusi PDRB pulau jawa terhadap PDB Indonesia mempunyai angka yang cukup besar. Distribusi PDRB Provinsi Jawa Barat mendapat posisi ketiga diantara provinsi-provinsi lainnya di Jawa Barat setelah DKI Jakarta dan Jawa Timur. Angka distribusi PDRB dalam kurun waktu 5 tahun terakhir

mempunyai angka yang cenderung mengalami penurunan yang cukup signifikan dimana pada tahun 2020 menurun sebesar 0,02% dan di tahun 2021 menurun sebesar 0,19%.

Wilayah pusat kota dan pusat pemerintahan seperti Provinsi Jawa Barat merupakan tempat konsentrasi penduduk yang cukup tinggi dengan dilihat dari seberapa banyaknya kepadatan penduduk yang terdapat di wilayah tersebut. Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat, dengan aktivitas perekonomiannya yang menjadikan Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi yang merupakan *center/pusat* tidak hanya dalam perekonomian, namun juga dalam perdagangan barang dan jasa. Tentunya untuk menunjang aktivitas perekonomian tersebut dibutuhkan sarana infrastruktur yang memadai sehingga mempermudah para pelaku ekonomi dalam menjalankan aktivitasnya.

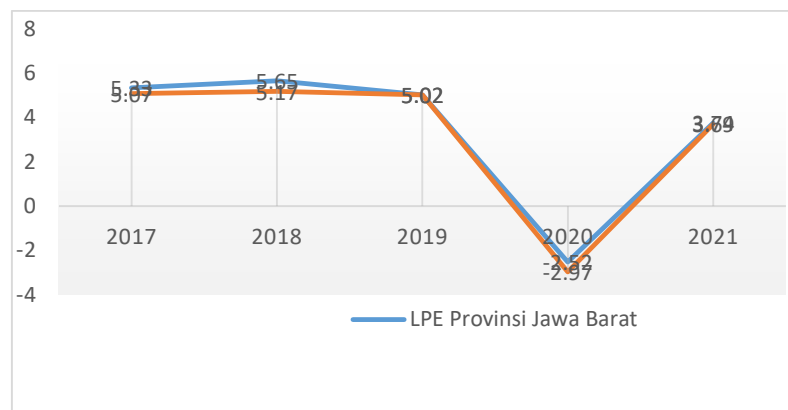
Merujuk pada publikasi *World Development Bank (World Bank, 1994)*, infrastruktur berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dimana pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dijumpai pada wilayah dengan tingkat ketersediaan infrastruktur yang memadai. Secara umum program pembangunan infrastruktur di beberapa Negara difokuskan dalam jangka menengah dengan peningkatan beberapa kebutuhan dasar dan konektivitas manusia, mulai dari air, listrik, dan energi, hingga transportasi (jalan raya, kereta api, pelabuhan, dan bandara). Salah satu pembangunan infrastruktur yang sangat penting adalah transportasi. Infrastruktur di bidang

transportasi merupakan salah satu faktor penting untuk menunjang ekonomi di suatu wilayah sebagai fasilitas yang bermanfaat untuk mobilitas penduduk dan perusahaan. Dalam sarana transportasi, infrastruktur jalan menjadi faktor penting dalam mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari suatu daerah ke daerah lain.

Keberadaan infrastruktur merupakan roda penggerak bagi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Hal tersebut dimana infrastruktur sendiri merupakan prasyarat bagi sektor-sektor lain untuk berkembang dan juga sebagai sarana penciptaan hubungan antara yang satu dengan yang lainnya (Farah SM, Dkk:2017).

Infrastruktur yang memadai seperti tersedianya infrastruktur ekonomi yaitu, jalan, listrik, air bersih, dan telepon sangat berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas ekonomi di Provinsi Jawa Barat. Pengaruh tersebut dapat berupa peningkatan jumlah produksi barang yang dihasilkan, terciptanya lowongan pekerjaan, serta perkembangan sektor-sektor industri yang dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi. Adanya infrastruktur sosial seperti pendidikan dan kesehatan juga akan berperan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Hasil dari pendidikan yang baik dan berkualitas akan menghasilkan sumber daya manusia atau tenaga kerja yang produktif, mempunyai pengetahuan dan wawasan serta keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan untuk menjalankan aktivitas ekonomi. Sedangkan untuk sektor kesehatan mempunyai fungsi dalam pelayanan jasa kesehatan sebagai penunjang

apakah dalam wilayah tersebut sudah mempunyai kualitas dan pelayanan kesehatan yang baik atau sebaliknya. Dari nilai ekonomis infrastruktur sosial dapat menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas untuk pertumbuhan ekonomi. Faktor tersebut yang menjadikan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk lebih mengencangkan perbaikan dan pembangunan infrastruktur untuk memudahkan dalam mobilitas masyarakat atau perusahaan guna meningkatkan produktifitas dan aksesibilitas alur lalu lintas barang dan pelaku ekonomi (Sofia:2019).



Gambar 1.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021
(dalam persen)

Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional

Laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat menunjukkan angka yang terus menurun dari tahun 2018, terutama pada tahun 2020 turun sebesar 7,54% menjadi -2,52%. Pelemahan kinerja ekonomi pada tahun 2020 merupakan dampak pandemi COVID-19 yang mulai mewabah sejak bulan Maret 2020. Penurunan ini merupakan andil dari hampir semua lapangan usaha, kecuali beberapa bidang yang masih tumbuh positif bahkan ada yang

meningkat secara signifikan yaitu informasi dan komunikasi. Beberapa lapangan usaha yang tumbuh positif di tahun 2020 adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 2,29%, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 10,8%, informasi dan komunikasi sebesar 34,64%, jasa keuangan dan asuransi sebesar 1,15%, *real estate* 1,92%, dan jasa pendidikan sebesar 6,69%. Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat selama periode 2017-2019 selalu lebih tinggi dari LPE nasional dengan kisaran 5,33% hingga 5,65%. Namun krisis dibandingkan akibat COVID-19 menyebabkan pelemahan kinerja perekonomian baik global maupun nasional hingga perekonomian Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 berkontraksi.

Terdapat sejumlah aspek yang patut dipertimbangkan dalam tantangan dan prospek ekonomi regional Jawa Barat, salah satunya adalah terkait belanja infrastruktur. Proyek infrastruktur yang akan dikembangkan diantaranya adalah jalan, jembatan, rel kereta api, dan terminal bus. Pemerintah pusat melakukan relokasi belanja subsidi dan infrastruktur pada tahun 2017. Penurunan subsidi tersebut direlokasikan untuk kebutuhan belanja infrastruktur yang memiliki efek multiplier besar terhadap perekonomian untuk mengejar pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,1 persen. Terkait pendanaan dan perbaikan kondisi infrastruktur, selama ini kendala yang dihadapi adalah mengenai pendanaan dan permasalahan hukum. Alokasi belanja pemerintah untuk infrastruktur dalam delapa tahun terakhir rata-rata hanya sekitar 1,6% dari jumlah PDB. Rasio ini relatif

rendah jika dibandingkan dengan negara lain seperti India dan China yang masing-masing mencapai 7,3 dan 5,3 persen dari jumlah PDB.

Infrastruktur merupakan faktor penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi serta memiliki peran penting dalam memperlancar kegiatan dan mobilitas ekonomi di suatu daerah. Kebijakan belanja modal yang dilakukan pemerintah diyakini dapat menggerakkan sector riil, menyerap tenaga kerja, meningkatkan konsumsi masyarakat dan pemerintah, serta memicu kegiatan produksi. Sektor infrastruktur berperan sebagai faktor utama yang dapat memperlancar aktivitas ekonomi. Maka dari itu, pemerintah terus meningkatkan anggaran untuk infrastruktur sebagai upaya pembenahan kondisi infrastruktur dalam mengurangi kesenjangan pendapatan dan dampak jangka Panjang bagi PDB per kapita. Perbaikan infrastruktur memiliki kontribusi dalam meningkatkan produktivitas dan diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dalam jangka Panjang. Sejak 2009-2019 anggaran infrastruktur terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) terus meningkat dan selalu ada di atas 8 persen.



Gambar 1.3
Anggaran Infrastruktur Tahun 2017-2021 (dalam triliun rupiah)

Sumber : Kata Data Indonesia Tahun 2021

Adanya COVID-19 pada tahun 2020 menyebabkan pertumbuhan ekonomi menurun, akibatnya APBN berkurang sehingga anggaran untuk pembangunan infrastruktur pada tahun 2020 turun sebesar 28,68%. Tercatat jumlah anggaran tahun 2021 naik 41,45% dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya sebesar Rp.281,1 triliun. Presiden Joko Widodo menganggarkan Rp.417.4 untuk pembangunan infrastruktur dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022. Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mendukung sejumlah penguatan pelayanan dasar serta mendukung peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas.

Calderon (2011) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berhubungan positif dan signifikan dengan stok dan kualitas infrastruktur di suatu wilayah. Farah (2017) menyimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur ekonomi yang terdiri dari infrastruktur jalan, listrik, dan air

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional Jawa Barat.

Untuk meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, pemerintah perlu lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial yang memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan perekonomian nasional yaitu dimulai dari infrastruktur jalan, listrik, dan air (Yanti M:2018).

Pembangunan infrastruktur di Provinsi Jawa Barat berlangsung cukup lama dan memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Anggaran atau biaya untuk pembangunan infrastruktur yang tidak kecil, serta infrastruktur yang mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi (Sofia:2019). Terdapat dua jenis infrastruktur dalam penelitian ini, yaitu infrastruktur sosial dan infrastruktur ekonomi di Provinsi Jawa Barat, infrastruktur sosial meliputi infrastruktur pendidikan dan infrastruktur kesehatan, sedangkan infrastruktur ekonomi meliputi infrastruktur jalan dan infrastruktur listrik.

Infrastruktur jalan memiliki peran yang cukup dominan dalam menyalurkan berbagai produk industri barang, dan melayani kebutuhan masyarakat terutama mengatasi ketimpangan perekonomian di pedesaan (Sofia:2019). Merujuk pada publikasi Provinsi Jawa Barat dalam angka oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat tahun 2022, panjang jalan di Provinsi Jawa Barat pada akhir tahun 2021 adalah 28.176,98 km. Jika dirinci

berdasarkan kewenangan maka sepanjang 1.789,20 km adalah kewenangan negara, 2.360,60 km kewenangan provinsi, dan sisanya 24.027,18 adalah kewenangan kabupaten/kota. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, panjang jalan di Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan.

Dalam bidang pendidikan, infrastruktur pendidikan merupakan salah satu indikator untuk meningkatkan kualitas pendidikan (Sofia:2019). Pemerintah pusat maupun daerah sudah sangat menyadari akan hal ini. Terlihat dengan penambahan jumlah sekolah baik swasta maupun negeri yang ada di daerah. Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat dalam publikasinya tahun 2022, jumlah sekolah menurut tingkat pendidikan di Provinsi Jawa Barat 2021, untuk tingkat SD ada sebanyak 19.639 sekolah, SMP sebanyak 5.684 sekolah, SMA sebanyak 1.667 sekolah, dan SMK sebanyak 2.907 sekolah. Pada tahun 2021, jumlah sekolah baik ditingkat SD, SMP, SMA, dan SMK mengalami kenaikan, dikarenakan adanya penambahan sekolah-sekolah swasta yang berada di lingkungan Provinsi Jawa Barat. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan modal dasar penting dalam pelaksanaan pembangunan.

Listrik mempunyai pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi, karena listrik mempunyai kaitan erat dengan produktivitas tenaga kerja. Listrik menjadi sumber penerangan dan salah satu sumber utama dalam kegiatan produksi. Meningkatnya energi listrik dapat meningkatkan pendapatan melalui produktivitas tenaga kerja, karena hampir seluruh kegiatan produksi saat ini memerlukan tenaga listrik (Dyah Amalia,

2019). Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat dalam publikasinya tahun 2022, jumlah pelanggan listrik di Jawa Barat sebanyak 15.765.747 pelanggan dengan daya tersambung sebesar 28.622.120.857 VA di akhir tahun 2021, angka ini menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya.

Secara ekonomi masyarakat yang sehat akan menghasilkan tenaga kerja yang sehat dan merupakan daya input untuk pertumbuhan ekonomi (Mohammad Abid M:2019). Fasilitas kesehatan yang terdapat di Provinsi Jawa Barat pada akhir tahun 2021 adalah klinik/balai kesehatan sebanyak 3.137 unit, diikuti oleh polindes dan puskesmas sebanyak 1.416 unit dan 1.098 unit sebagai fasilitas pelayanan terdekat dengan masyarakat.

Kaitan antara infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi masih dalam perdebatan paling tidak sampai saat ini ada 2 pendapat mengenai pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi yang didasarkan pada penelitian masing-masing. Pendapat pertama menyatakan bahwa pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi adalah positif. Yang berpendapat kedua mengatakan bahwa pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi tidak signifikan bahkan negatif. Perdebatan di kalangan ekonom dan para pembuat kebijakan publik mengenai pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi masih berlangsung sampai saat ini (Tanjung Hapsari:2011).

Berdasarkan latar belakang diatas dan dengan adanya beberapa penelitian mengenai pengaruh infrastruktur terhadap perekonomian suatu wilayah, maka penulis ingin melakukan penelitian mengenai **“PENGARUH INFRASTRUKTUR TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTODI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2007-2021.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka identifikasi masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Infrastruktur Jalan, Pendidikan, Listrik, dan Kesehatan secara parsial terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Jawa Barat Tahun 2007-2021?
2. Bagaimana pengaruh Infrastruktur Jalan, Pendidikan, Listrik, dan Kesehatan secara bersama-sama terhadap Produk Domestik Regional Brutodi Provinsi Jawa Barat Tahun 2007-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui Bagaimana pengaruh Infrastruktur Jalan, Pendidikan, Listrik, dan Kesehatan secara parsial terhadap Produk Domestik Regional Brutodi Provinsi Jawa Barat Tahun 2007-2021.

2. Mengetahui Bagaimana pengaruh Infrastruktur Jalan, Pendidikan, Listrik, dan Kesehatan secara bersama-sama terhadap Produk Domestik Regional Brutodi Provinsi Jawa Barat Tahun 2007-2021.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Melalui Penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat sebagai berikut :

1. Untuk Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dan referensi dalam penentuan kebijakan yang akan diterapkan mengenai perkembangan infrastruktur dan Produk Domestik Regional Brutodi Provinsi Jawa Barat.

2. Untuk Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan terutama dalam bidang ekonomi. Selain itu, dapat juga menjadi bahan perbandingan penelitian pada penelitian selanjutnya mengenai analisis pengaruh infrastruktur terhadap produk domestik regional bruto.

3. Untuk Penulis

Membantu dalam menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai perkembangan infrastruktur dan produk domestik regional bruto suatu daerah atau suatu wilayah.

